

PENGARUH PENERAPAN *E-SPT* PPN TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK DALAM PENGUNAAN *E-SPT* PPN (STUDI KASUS PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT)

Rizki Afrika^{*1}, Betri², Icha Fajriana³

^{1,2,3}STIE Multi Data Palembang; Jl. Rajawali No 14 Palembang, telp(0711) 376400

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Palembang

e-mail: ^{*1}rizkiafrika@yahoo.com, ²betri.sirajuddin@gmail.com, ³Icha.fajriana@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap kepuasan Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Penelitian ini menggunakan Simple Random Sampling dengan jumlah sampel 95 responden PKP Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang berisi jawaban responden. Analisis deskriptif menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) pada variabel X terhadap Y adalah 37,4%. Variabel X menghasilkan nilai t hitung sebesar 7,446 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan nilai t tabel adalah 1,985. Jadi t hitung > t tabel, yang berarti bahwa Penerapan e-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Wajib Pajak.

Kata kunci—Penerapan *e-SPT* PPN, Kepuasan Wajib Pajak.

Abstract

The objective of this research is to investigate the influence of the implementation of electronic tax return in Value-added Tax (e-SPT PPN) to the taxpayer satisfaction who has been confirmed as agency taxable entrepreneur. This research used is simple random sampling with a sample of 95 respondents, Entrepreneur taxable agency in the Tax Service Office Pratama Palembang Ilir Barat. The data used is primary data obtained through a questionnaires that contains the answers of the respondents. Descriptive analysis indicates the coefficient of determination (R^2) in the variable X to Y is 37.4%. Variable X produces t count is 7,446 with a significance level of 0.000 and t table is 1.985. So t count > t table, which means that the implementation of electronic tax return (e-SPT) in Value-added Tax significantly affect to taxpayer satisfaction.

Keyword— *e-SPT* PPN, Taxpayer Satisfaction.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Pemerintah sendiri telah menetapkan target - target yang direncanakan kedepannya, salah satunya perkembangan sosial dan kesejahteraan antara semua orang dan daerah, dengan cara membangun sarana prasarana publik yang merata di Indonesia. Pembiayaan yang besar

digunakan untuk mencapai target tersebut agar pembangunan dapat direalisasi dan diselesaikan, dalam hal ini sumber kas negara yang di prioritaskan adalah berasal dari sektor pajak.

Pembangunan di Indonesia saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Pemerintah sendiri telah menetapkan target - target yang direncanakan kedepannya, salah satunya perkembangan sosial dan kesejahteraan antara semua orang dan daerah, dengan cara membangun sarana prasarana publik yang merata di Indonesia. Pembiayaan yang besar digunakan untuk mencapai target tersebut agar pembangunan dapat direalisasi dan diselesaikan, dalam hal ini sumber kas negara yang di prioritaskan adalah berasal dari sektor pajak.

Pajak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap negara sebagai alat pembiayaan pembangunan dalam negeri. Tercatat menurut Rahmany dalam Aprilina (2012) bahwa realisasi pajak pada tahun 2011 adalah Rp. 872,6 triliun atau mencapai 99,3% dari target Rp. 878,7 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2010, maka realisasi penerimaan pajak tahun 2011 meningkat sebesar Rp. 149,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%. Pada tahun 1983, Direktorat Jendral Pajak mengubah sistem pemungutan pajak yang sebelumnya adalah *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Perubahan dan perkembangan teknologi yang pesat serta perkembangan dunia usaha yang mengarah pada era globalisasi, mempengaruhi tatanan masyarakat baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek-aspek lainnya. Pemerintah berusaha mengembangkan segala aspek dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat, melalui penetapan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair* yaitu pajak berfungsi untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan tidak boleh dibelokkan untuk tujuan yang menyimpang, upaya suatu negara dalam menghimpun dana keuangannya merupakan sarana bagi sumber pembiayaan semua tujuannya.

Reformasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak (WP), salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (*e-SPT*). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan sanksi denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satunya adalah *e-SPT* yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh WP demi kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan *e-SPT* dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan pajak diharapkan akan meningkat.

Toruan dalam Sitompul (2012) "Inti reformasi dan modernisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah pembaruan sistem pelayanan. Sebelum ada *e-SPT* para Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengalami tingkat kesulitan yang cukup tinggi untuk melakukan pengisian SPT baik SPT PPN maupun PPh."

Pengisian dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan dengan *e-SPT*, maka PKP tidak perlu melaporkan SPT dalam lampiran SPT dengan jumlah yang banyak dan lebih mudah, dan PKP tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengalami antrian lama dikarenakan aparat pajak tidak perlu lagi melakukan perekam data yang akan dikirimkan kepada DJP. Hal ini dikarenakan pengisian dan pelaporan SPT dengan menggunakan *e-SPT* telah berbentuk rekaman SPT secara *digital* seperti dalam bentuk *Flash Disc* atau *Compact Disc* (CD) dan dalam bentuk disket, maka para aparat cukup mengcopy data SPT yang dilaporkan secara digital tersebut.

Sistem pelaporan SPT secara elektronik diberlakukan atas dasar peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan yang menyebutkan bahwa:

1. Bagi Wajib Pajak yang telah ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku sebelum Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 ditetapkan, maka kewajiban penggunaan *e-SPT* berlaku terhitung sejak 1 Juli 2009.
2. Bagi Wajib Pajak yang ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku setelah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 ditetapkan, maka kewajiban penggunaan *e-SPT* berlaku sejak awal bulan keenam setelah bulan Wajib Pajak ditetapkan.

Tax ratio Negara Indonesia selama sepuluh tahun belakangan hanya berada pada kisaran 11-12 persen dan tergolong rendah dibandingkan negara-negara di ASEAN (Firdaus dalam Oktaviani, 2012) akibat adanya upaya-upaya penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah-celah dari peraturan perundang-undangan (*tax avoidance*), hal ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan (*tax compliance*) Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya masih sangat rendah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membuat pemerintah mengambil langkah konkrit untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya dalam melaporkan kembali SPT Masa PPN, yakni dengan memberlakukan sistem SPT elektronik (*e-SPT*) untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sistem ini diberlakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan dari sistem administrasi pajak modern, dengan tujuan untuk mempermudah para Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Masa PPN.

Berkenaan dengan peraturan terbaru dari Dirjen Pajak yaitu PER-11/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT Masa PPN pada tanggal 12 April 2013, dan PER-21/PJ/2013 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN pada tanggal 30 Mei 2013, Dirjen Pajak tidak lagi mengizinkan PKP badan untuk melaporkan SPT Masa PPN secara *hard copy* (manual), setiap Badan yang dikukuhkan sebagai PKP serta PKP Orang Pribadi yang melakukan transaksi lebih dari atau sama dengan 25 transaksi per bulan diharuskan melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya menggunakan *e-SPT* PPN.

Penulis telah melakukan wawancara tidak terstruktur mengenai aplikasi *e-SPT* PPN kepada tiga Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, dua diantaranya merasa puas dengan aplikasi ini karena dapat membantu kegiatan perpajakan, namun seorang PKP lainnya mengatakan bahwa masih belum efisien, karena masih harus melampirkan manual SPT Masa PPN, jadi tidak hanya menyerahkan SPT Masa PPN dalam bentuk *software*, tetapi juga melampirkan SPT Masa PPN manual. Jadi PKP harus membuat dua laporan pajak yaitu pengisian melalui aplikasi *e-SPT* serta membuat lampiran manual.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penerapan *e-SPT* PPN Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Dalam Penggunaan *e-SPT* PPN (Studi Kasus Pada Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber utama kas negara, sehingga perlu di tingkatkan guna menciptakan dan membangun sarana publik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Menciptakan masyarakat yang patuh terhadap perpajakan adalah suatu hal yang sangat berperan penting dalam mensukseskan tujuan tersebut. Peningkatan kesadaran masyarakat harus diikuti dengan sarana yang mendukung, seperti peningkatan modernisasi administrasi sistem perpajakan seperti yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H menyebutkan Pengertian pajak dalam Resmi (2013, h. 1) bahwa: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Dasar pengenalan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No tahun 1983. Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994 dan diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000. Waluyo (2007, h. 2) mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

"Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah atau disingkat PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa."

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa:

"Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Mardiasmo (2006, h. 26), menyatakan bahwa "Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Mardiasmo (2006, h. 26), menyebutkan fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak:

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang.
- b. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Mardiasmo (2006, h. 28) menyatakan Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) ada dua macam yaitu:

- a. SPT masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak.
- b. SPT masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

Menurut Direktorat Jendral Pajak yang dimuat dalam website (www.kppbumn.depkeu.go.id) "e-SPT adalah surat Pemberitahuan dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jendral Pajak kepada Wajib Pajak yang

digunakan untuk merekam, memelihara data, menghasilkan data, dan mencetak Surat Pemberitahuan beserta lampirannya dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak."

Menurut Peraturan Jendral Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik, "e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak."

2.4 Definisi e-SPT PPN

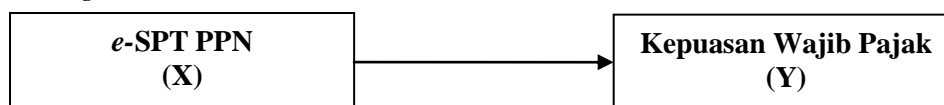
Menurut Direktorat Jenderal Pajak tentang definisi e-SPT PPN (2008) dalam www.kppbumn.depkeu.go.id, menyatakan bahwa: "e-SPT PPN adalah SPT PPN dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya, menghasilkan dan SPT digital serta mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak." Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa e-SPT PPN adalah sebuah aplikasi perekaman data transaksi PPN untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan pelaporan perpajakannya.

2.5 Definisi e-SPT PPN

Sebagai wujud modernisasi sistem administrasi perpajakan, e-SPT PPN sebagai alat untuk meningkatkan kepuasan PKP sebagai pemakai e-SPT PPN dengan mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan. Day dalam Tjiptono (2008) mengatakan "Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidak sesuaian (*disconfirmation*) yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya." Sedangkan Kotler dalam Sitompul (2012) menyatakan bahwa definisi kepuasan adalah sebagai berikut:

"Satisfaction is a person feelings of pleasure or disappointment resulting from comparing a products perceived performance in relation to his or her expectation." Artinya "Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan yang diharapkan. Atau sebagai respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian."

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir

2.7 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang ada serta landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disusun suatu hipotesis terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu "Penerapan e-SPT PPN Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak dalam Penggunaan e-SPT PPN (Studi Kasus pada Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)."

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian yang akan menjawab perumusan masalah mengenai gambaran masing-masing variabel yang diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Y yang diteliti

3.2 Objek/Subjek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian adalah penerapan *e-SPT* PPN dan tingkat kepuasan PKP pengguna *e-SPT* PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Subjek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang dikukuhkan sebagai PKP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah *Probability Sampling*, dimana penulis menetapkan *Simple Random Sampling* sebagai teknik pengambilan sampelnya, karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu dan anggota populasi di anggap homogen.

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan yang terdaftar sebagai PKP di KPP Ilir Barat Palembang serta menggunakan aplikasi *e-SPT* PPN yaitu sejumlah 1.875 Pengusaha Kena Pajak.

3.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 95 Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan telah menggunakan *e-SPT* PPN di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan peneliti, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan langsung ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan sesuai masalah yang akan diteliti.

3.6 Definisi Operasional

Tabel 1 Definisi Operasional dan Indikator

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukur
Penerapan <i>e-SPT</i> PPN (X)	penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer	<ul style="list-style-type: none"> - kemudahan penghitungan - Kemudahan perekaman data - kepraktisan 	Interval
Kepuasan Wajib Pajak dalam Penggunaan <i>e-SPT</i> PPN (Y)	Respon Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP terhadap kepuasan penggunaan aplikasi <i>e-SPT</i> PPN	<ul style="list-style-type: none"> - Menghasilkan informasi yang jelas, akurat dan tepat waktu. - Meminimalkan jumlah SDM. - Menghemat waktu dan biaya. 	Interval

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2014

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Penerapan *e*-SPT PPN

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Item1	0,766	0,2017	Valid
Item2	0,732	0,2017	Valid
Item3	0,697	0,2017	Valid
Item4	0,655	0,2017	Valid
Item5	0,670	0,2017	Valid
Item6	0,760	0,2017	Valid
Item7	0,669	0,2017	Valid
Item8	0,808	0,2017	Valid
Item9	0,740	0,2017	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2014

Seluruh pertanyaan variabel Penerapan *e*-SPT PPN (X) dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hasil *r*-hitung dari 9 pertanyaan semuanya diatas *r* tabel yang sebesar 0,2017 ini menunjukkan semua pertanyaan sudah valid. Kevalidan ini dapat dilihat dari $[(sig.(2-tailed))] \leq$ nilai $\alpha = 0,05$.

4.2 Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan *e*-SPT PPN

Variabel	Cronbach's Alpha Item	Cronbach's Alpha	Hasil Penelitian
Penerapan <i>e</i> -SPT PPN (X)	0,804	0,6	Reliabel
Kepuasan Wajib Pajak (Y)	0,738	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2014

Dari tabel 2 diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* dari tiap variabel Penerapan *e*-SPT PPN (X) dan Kepuasan Wajib Pajak (Y) lebih besar dari *Cronbach's Alpha* sebesar 0,6 yaitu 0,804 untuk variabel Penerapan *e*-SPT PPN (X) dan 0,738 untuk variabel Kepuasan Wajib Pajak (Y) berarti seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

4.3 Uji Normalitas

Tabel 4 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	95
	Std. Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	N
		,061

	Positive	,061
	Negative	-,039
Kolmogorov-Smirnov Z		,590
Asymp. Sig. (2-tailed)		,877

a. Test distribution is Normal.

b. User-Specified

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2014

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS 22, terlihat bahwa *P-value* yaitu Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai $0,877 > 0,05$. Karena signifikansi untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual telah memenuhi asumsi distribusi normal.

4.4 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Hasil
Penerapan <i>e</i> -SPT PPN	0,948	Bebas Heteroskedastisitas

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 22 diatas, dengan *Sig.* variabel Penerapan *e*-SPT PPN (X) menghasilkan nilai 0,948. Dari tabel tersebut, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas.

4.5 Uji *t*

Tabel 6 Hasil Uji *t*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,930	,903		4,352	,000
Penerapan <i>e</i> -SPT PPN	,311	,042	,611	7,446	,000

a. Dependent Variable: Kepuasan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2014

Nilai *t* hitung variabel Penerapan *e*-SPT PPN (X) adalah sebesar 7,446 sedangkan *t* tabel dengan taraf $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 1,985. Nilai *t* tabel dicari dengan menggunakan tabel *t-student* (Syofian Siregar 2012, h. 404). Nilai *t* hitung variabel Penerapan *e*-SPT PPN (X) adalah 7,446 sedangkan *t* tabel dengan taraf ($\alpha = 5\%$, $df = 95 - 1 - 1 = 93$ dengan menggunakan Ms. Excel dengan rumus $=\text{tinv}(0.05,93)$ adalah sebesar 1,985801768.

Berdasarkan tabel pengujiannya, jika *t* hitung $< t$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika *t* hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Pada penelitian ini *t* hitung $7,446 > t$ tabel 1,985, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara Penerapan *e*-SPT PPN pada Pengusaha Kena Pajak terhadap Kepuasan Wajib Pajak

4.6 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,611 ^a	,374	,367	1,576	1,983

a. Predictors: (Constant), Penerapan *e*-SPT PPN

b. Dependent Variable: Kepuasan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2014

Diperoleh nilai *R square* atau Koefisien Determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 37,4% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas Penerapan *e*-SPT PPN (X) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 37,4% terhadap variabel Kepuasan Wajib Pajak (Y) dan 62,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor - faktor lain dalam variabel Penerapan *e*-SPT PPN (X).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil pengujian sebelumnya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Pada penelitian ini $t_{hitung} 7,446 > t_{tabel} 1,985$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara Penerapan *e*-SPT PPN pada Pengusaha Kena Pajak terhadap Kepuasan Wajib Pajak.

Penerapan *e*-SPT secara signifikan berpengaruh terhadap Kepuasan Wajib Pajak karena Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, data perpajakan terorganisasi dengan baik dan sistematis, penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, kemudahan dalam membuat laporan pajak, efisiensi dalam melaporkan pajak, kemudahan dalam mengetahui lebih bayar atau kurang bayar secara akurat, serta membantu meminimalkan jumlah SDM dalam proses penghitungan dan perekaman data.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan *e*-SPT PPN terhadap tingkat kepuasan PKP pengguna *e*-SPT PPN, maka penulis akan memberikan saran yang dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna (*user*) terhadap aplikasi *e*-SPT maka diperlukan sosialisasi dari DJP tentang tata cara penggunaan aplikasi *e*-SPT kepada *user* secara terbuka
2. Penyampaian laporan PPN sudah bisa dilakukan secara online (*e-Filling*) maka seharusnya wajib pajak tidak perlu menyampaikan kembali *hardcopy* ke KPP untuk menghindari pemborosan penggunaan kertas.

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah perlu memperluas variabel penelitian dengan menambah faktor lain misalnya Sosialisasi *e*-SPT PPN, Kompetensi Pegawai Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aprilina, Ria 2012, *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)*.
 - [2] Sitompul, Veronika 2010, *Pengaruh Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT PPN) Terhadap Tingkat Kepuasan PKP Pengguna Aplikasi e-SPT PPN” (Pada PKP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)*.
 - [3] —, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009, Diakses 17 September 2014, <http://www.ortax.org>.
 - [4] —, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 11/PJ/2013, Diakses pada 17 September 2014, <http://www.ortax.org>.
 - [5] Ortax 2010, *Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang - Undang Perpajakan*, PT Integral Data Prima, Jakarta.
 - [6] Resmi, Siti 2013, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
 - [7] Waluyo 2007, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
 - [8] Kantor Pelayanan Pajak Usaha Milik Negara, *Penerapan e-SPT*, Diakses pada 17 September 2014, dari <http://www.kppbumn.depkeu.go.id>.
-